1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

    1. **PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH DAN ATAU PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING, BARANG LAINNYA DAN JASA SERTA RISIKO KE DEPAN.**
    2. **Indeks Perkembangan Harga Bulan Juli Tahun 2026**
    - Pada Minggu ke-I Juli 2026 IPH Kabupaten Takalar (-3,27) dengan komoditas andil terbesar Cabai Rawit, daging ayam ras, dan cabai merah.
    - Pada Minggu ke-II Juli 2026 IPH Kabupaten Takalar (-3,39) dengan komoditas andil terbesar cabai rawit, daging ayam ras, dan cabai merah. Dengan fluktuasi harga tertinggi minggu berjalan adalah cabai merah dengan nilai fluktuasi 0,039.
    - Pada Minggu ke-III Juli 2026 IPH Kabupaten Takalar (-3,33) dengan komoditas andil terbesar cabai rawit, daging ayam ras, dan cabai merah. Dengan Fluktuasi harga tertinggi minggu berjalan adalah cabai merah dengan nilai fluktuasi 0,053.
    - Pada Minggu Ke-IV Juli 2026 IPH kabupaten Takalar (-3,30) dengan komoditas andil terbesar Cabai Rawit, Daging Ayam Ras, dan Cabai Merah. Dengan Fluktuasi harga tertinggi minggu berjalan adalah Cabai Rawit dengan nilai fluktuasi 0,077.
    - Pada Minggu ke-V Juli 2026 IPH Kabupaten Takalar (-3,43) dengan komoditas andil terbesar Cabai Rawit, Daging Ayam Ras, dan Cabai Merah. Dengan Fluktuasi harga tertinggi minggu berjalan adalah Cabai Rawit dengan nilai fluktuasi 0,089.

    Pada bulan Juli Tahun 2026, perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Takalar berada pada zona deflasi dengan rata rata **-3,34%.** Deflasi terjadi selama 5 minggu berturut-turut.

    Deflasi terjadi di Minggu ke-V yang dipicu oleh melimpahnya pasokan. Panen cabai rawit dan cabai merah di Galesong dan manggarabombang, plus pasokan daging ayam ras yang surplus dari Makassar. Distribusi lancar karena tidak ada gangguan cuaca dan BBM stabil.

    Deflasi pada bulan Juli memberikan dampak positif bagi pengendalian Inflasi year-to-date Kabupaten Takalar dan menjaga daya beli masyarakat. Namun perlu di waspadai harga yang terlalu rendah dapat merugikan petani cabai local dan berpotensi terjadi inflasi balasan (Rebound Inflation) di bulan Agustus-september saat musim kemarau puncak yang dapat menganggu produksi. Oleh karena itu, TPID kabupaten Takalar tetap melakukan pemantauan harga harian, operasi pasar murah, dan menjaga kerjasama antar daerah (KAD) untuk menjaga stabilitas harga.

    1. **Indeks Perkembangan Harga Bulan Agustus Tahun 2026**
    - Pada Minggu ke-I Agustus 2026 IPH Kabupaten Takalar (-0,67) dengan komoditas utama penyumbang cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah. Dengan fluktuasi harga tertinggi minggu berjalan adalah bawang putih dengan nilai fluktuasi 0,014
    - Pada Minggu Ke-II Agustus 2026 IPH Kabupaten Takalar (0,9) dengan komoditas utama penyumbang daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit. Dengan Fluktuasi harga tertinggi minggu berjalan adalah cabai Rawit dengan nilai fluktuasi (0,175).
    - Pada Minggu Ke-III Agustus 2026 IPH Kabupaten Takalar (1,79) dengan Komoditas utama penyumbang daging ayam ras, cabai rawit dan Cabai Merah. Dengan fluktuasi harga tertinggi minggu berjalan adalah cabai rawit dengan nilai fluktuasi 0,268.

Pada minggu ke-IV Agustus 2026 IPH Kabupaten Takalar (2,15) denga komoditas utama penyumbang Cabai Rawit, Daging Ayam Ras, Cabai Merah. Dengan fluktuasi harga tertinggi minggu berjalan adalah Cabai Rawit dengan nilai fluktuasi 0,272.

Pada bulan Agustus Tahun 2026, perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Takalar yang bersumber dari pemantauan harga pangan strategis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan kondisi yang mulai berbeda pada bulan juli. Berdasarkan hasil pemantauan mingguan, pada akhit periode Agustus tercatat IPH mulai bergerak naik yaitu **+2,10 %**, yang mencerminkan adanya peningkatan harga pada sejumlah komoditas pangan utama.

Kenaikan IPH tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditas hortikultura, khususnya cabai rawit dan bawang merah, serta komoditas protein hewani seperti daging ayam ras dan telur ayam ras. Peningkatan harga ini terjadi seiring dengan berkahirnya masa panen raya Cabai, meningkatnya permintaan masyarakat menjelang HBKN Maulid Nabi Muhammad SAW, serta adanya keterbatasan pasokan akibat factor cuaca kemarau puncak yang mempengaruhi produksi dan distribusi.

Selain itu, tekanan harga juga dipengaruhi oleh tingginya volatilitas komoditas pangan strategis yang sensitif terhadap perubahan pasokan dan permintaan dalam jangka pendek. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai langkah pengendalian, antara lain pemantauan harga secara intensif, penguatan koordinasi dengan distributor, serta pelaksanaan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga.

Secara keseluruhan, perkembangan IPH pada bulan Agustus 2026 menunjukkan adanya tekanan inflasi yang meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih dalam batas yang dapat dikendalikan melalui upaya pengendalian yang terkoordinasi.

1. **Indeks Perkembangan Harga Bulan September Tahun 2026**
   - Pada Minggu ke-I September 2026 IPH Kabupaten Takalar (4,26) dengan komoditas utama penyumbang cabai rawit, daging ayam ras, dan Cabai merah. Dengan fluktuasi harga tertinggi minggu berjalan adalah cabai rawit dengan nilai fluktuasi 0,082.
   - Pada Minggu Ke-II September 2026 IPH Kabupaten Takalar (4,81) dengan komoditas utama penyumbang cabai rawit, daging ayam ras, dan Telur Ayam Ras. Dengan Fluktuasi harga tertinggi minggu berjalan adalah daging ayam ras dengan nilai fluktuasi 0,068.
   - Pada Minggu Ke-III September 2026 IPH Kabupaten Takalar (4,83) dengan Komoditas utama penyumbang cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras. Dengan fluktuasi harga tertinggi minggu berjalan adalah daging ayam ras dengan nilai fluktuasi 0,069.
   - Pada minggu ke-IV September 2026 IPH Kabupaten Takalar (4,87) dengan Komoditas Cabai rawit, Daging ayam ras, Telur Ayam Ras. Dengan nilain fluktuasi tertinggi minggu berjalan adalah Daging ayam ras dengan nilai fluktuasi 0,065.

Pada bulan September Tahun 2026, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Takalar menunjukkan adanya tekanan harga terutama pada komoditas pangan hortikultura, khususnya

   -

cabai rawit. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan harga pangan pada tingkat regional, dimana cabai menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi pada September 2026. Secara Nasional, pada minggu pertama September harga cabai rawit telah mengalami peningkatan dan berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen. Selain cabai, komoditas daging ayam ras, telur ayam ras dan beras turut menjadi komditas yang perlu dipantau dalam perkembangan IPH Kabupaten Takalar. Sementara itu, ketersediaan beberapa komoditas pangan yang berada dalam pengendalian Pemerintah relative terjaga, sehingga tekanan harga tidak terjadi secara merata pada seluruh kelompok pangan. Kondisi tersebut sejalan dengan pemantauan TPID Sulawesi Selatan pada September yang menunjukkan bahwa komoditas seperti yang menunjukkan bahwa komoditas seperti besar dan minyak relatifstabil, sedangkan tekanan lebih kuat terjadi pada komoditas cabai.

Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga, ketersedian stok, dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis. Upaya pengendalian juga diarahkan pada penguatan produksi pangan local, menjaga kelancaran distribusi, serta meningkatkan koordinasi dengan petani, pelaku usaha, distributor, dan instansi terkait.

Secara keseluruhan, perkembangan IPH Kabupaten Takalar pada September 2026 menunjukkan tekanan harga terutama bersumber dari komoditas hortikultura yang bersifat Voltile, khususnya cabai rawit. Namun. Dengan adanya produksi cabai local, penguatan irigasi dan dukungan sarana produksi kepada petani serta pemantauan pasokan dan harga secara berkelanjutan, kondisi ketersediaan pangan di Kabupaten Takalar tetap dapat dijaga. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar dalam memperkuat ketahanan pangan daerah yang juga memperoleh pengakuan melalui penghargaan InTechSEA 2026 Kategori Gold Bidang Pangan pada September 2026.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. **IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH.**

Kendala yang masih dihadapi oleh TPID Kabupaten Takalar Pada Triwulan III Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. **Tekanan dari Komoditas “Volotile Food”**
2. Banyak komoditas pangan pokok di Kabupaten Takalar (seperti cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras) termasuk kategori volatile food yang harga dan pasokannya mudah bergejolak akibat factor musim, cuaca, dan masa panen. Pada triwulan III tahun 2026 komoditas tersebut mengalami pembalikan harga. Pada bulan juli 2026 terjadi panen raya hortikultura di kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Galesong sehingga harga di tingkat petani mengalami penurunan. Selanjutnya pada bulan Agustus-September 2026, harga mengalami peningkatan. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 29 September 2026, harga cabai rawit merah nasional tercatat sebesar Rp.105.300/Kg, cabai merah keriting sebesar Rp.105.300/Kg, dan bawang merah sebesar Rp. 60.000/Kg.
3. Fluktuasi tersebut menyulitkan TPID dalam menjaga stabilitas harga, terutama saat permintaan tinggi pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan peringatan HUT RI ke-81. Pada tanggal 26 September 2026, Pemerintah Kabupaten Takalar melaksanakan Panen Raya cabai di Moncongkomba

Kecamatan Polongbangkeng Selatan dengan harga di tingkat petani sebesar Rp.50.000/Kg. Kondisi tersebut menunjukkan adanya disparitas antara harga tingkat petani dan harga di tingkat konsumen yang dipengaruhi oleh rantai pasok dan biaya distribusi.

4. **Keterbatasan pasokan local, produktifitas & distribusi komoditas**
5. Tantangan umum di daerah Sulampua (termasuk Kabupaten Takalar) adalah produktivitas pertanian yang relatif masih dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan optimalisasi jaringan irigasi yang belum maksimal. Pada triwulan III 2026, kondisi kemarau berpengaruh terhadap produktivitas hortikultura di beberapa kecamatan sentra, hingga pasokan local mengalami penurunan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar secara optimal.
6. Jika produksi dan pasokan lokal kurang memadai, maka daerah jadi sangat tergantung pada distribusi dari luar daerah yang dapat membuat harga lebih rentan terhadap fluktuasi. Pada triwulan III 2026, Pemerintah Kabupaten Takalar telah menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli-September 2026 sebanyak 10 Kg Per penerima Bantuan Pangan (PBP) sekaligus pada tanggal 26 Agustus 2026 sebanyak 1,1 Juta Kilogram sebagai Upaya menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat.
7. Gangguan distribusi/logistic pada Triwulan III 2026 dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Takalar. Kondisi tersebut berdampak pada mobilitas dan biaya angkut bahan pangan.

1. **Kesulitan memprediksi lonjakan permintaan pada momen tertentu**
2. Menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-81 dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 5 September 2026 serta tradisi Maudu Lompoa di Kabupaten Takalar, permintaan barang pokok seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goring sering mengalami peningkatan.
3. Jika pasokan dan distribusi tidak diantisipasi dengan baik, lonjakan permintaan bisa menyebabkan kekurangan barang atau lonjakan harga meski tim TPID telah berupaya melakukan stabilisasi melalui operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan. Peningkatan permintaan beriringan dengan kondisi keterbatasan BBM, sehingga memerlukan langkah antisipasi agar pengendalian harga dapat berjalan optimal.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH**

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Takalar pada Triwulan III Tahun 2026 dilaksanakan secara responsif dan berbasis kondisi riil di lapangan yang dipengaruhi oleh HUT RI Ke-81, perayaan HBKN Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan tradisi Maudu Lompoa, serta gangguan distribusi akibat keterbatasan pasokan BBm di wilayah Sulawesi Selatan pada Bulan September 2026.

Dalam aspek **keterjangkauan harga**, TPID Kabupaten melakukan pemantauan harga di Pasar Sentral dan pasar-pasar kecamatan. Pada bulan Juli harga relative stabil, namun memasuki Agustus-September terjadi kenaikan pada cabai rawit, cabai merah dan bawang merah akibat berkurangnya pasokan local dan naiknya biaya angkut karena kelangkaan BBM. Upaya yang dilakukan adalah intervensi melalui Bantuan Pangan Beras. Pada tanggal 26 Agustus 2026 di

Gudang Bulog Palleko, Polongbangkeng Utara, Pemkab Takalar menyalurkan bantuan beras alokasi juli, agustus, September. Penyaluran tingkat kelurahan dilanjutkan pada tanggal 14-15 September 2026 di Kelurahan Pappa dan Salaka. Selain itu dilakukan operasi pasar terbatas menjelang Maudu Lompoa untuk menahan lonjakan Harga telur, daging ayam ras dan Minyak goring.

Pada aspek **ketersediaan pasokan**, stok beras di Takalar pada Triwulan III relative aman, didukung oleh pasokan petani local di Kecamatan Galesong dan Sanrobone serta dukungan stok Cadangan Beras Pemerintah Nasional yang per 1 September 2026 mencapai 5,1 juta ton. Namun komoditas hirtikultura ketersediaan masih bergantung pada pasokan dari Kabupaten Enrekang dan Bantaeng karena produktivitas local menurun akibat kemarau puncak dan belum optimalnya fungsi jaringan irigasi di beberapa desa sentra seperti Desa Cakura. Untuk mendorong produktivitas, pada tanggal 26 September 2026 Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye melaksanakan Panen Raya Cabai di Moncongkomba, Polsel dengan harga di tingkat petani Rp.50.000/Kg sekaligus menyerahkan bantuan pompa air kepada kelompok tani.

Pada aspek **kelancaran distribusi**, kendala utama pada Triwulan III adalah meningkatnya biaya transportasi dan kelangkaan BBM pada tanggal 11-19 September 2026 yang menyebabkan antrean panjang SPBU dan menghambat distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke pasar. TPID berkoordinasi dengan PT. Pertamina, Dinas Perhubungan dan aparat keamanan untuk pengawalan distribusi. Secara umum distribusi bahan pangan tetap terjaga melalui koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

Sementara itu, pada aspek **komunikasi efektif**, pada Triwulan III 2026 TPID Kabupaten Takalar telah melaksanakan High Level Meeting (HLM) TPID yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Takalar pada tanggal 14 Juli 2026 dengan tema “Menjaga Stabilitas Harga Pangan Menjelang HBKN Maudu Lompoa”. HLM tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekda, Kepala BPS, Perum Bulog Cabang Takalar, Dinas Perdagangan, Dinas TPHPKP, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Bagian Perekonomian & SDA, serta Bank Indonesia. HLM ini menjadi forum strategis awal untuk menyamakan persepsi langkah pengendalian inflasi menjelang lonjakan permintaan pada perayaan Maudu Lompoa. Informasi perkembangan harga dan imbauan agar masyarakat tidak melakukan panic buying selama masa krisis BBM dan menjelang Maudu Lompoa disampaikan secara berkala melalui media sosial resmi Pemkab dan laporan resmi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan strategi 4K pada Triwulan III 2026 di Kabupaten Takalar telah berjalan efektif. Diawali dengan HLM pada tanggal 14 Juli 2026 yang dipimpin Wakil Bupati sebagai langkah antisipatif menjelang HBKN Maudu Lompoa, dilanjutkan dengan intervensi bantuan pangan beras 1,1 Juta Kg, penguatan produksi lokal melalui panen raya dan bantuan alsintan, serta penanganan gangguan distribusi akibat keterbatasan BBM mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan di Kabupaten Takalar.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH.**

Evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pengendalian inflasi pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Aspek-Aspek yang Berhasil / Indikasi Positif

1.
2. **Stabilisasi harga komoditas utama relatif terkendali**

Perkembangan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Takalar selama Triwulan III relative dapat dikendalikan melalui pemantauan harga dan intervensi pemerintah. Meskipun terdapat tekanan pada beberapa komoditas Voltile Food, terutama cabai, beras, telur dan daging ayam, kondisi tersebut masih dapat diantisipasi melalui langkah stabilitas pasokan dan harga. Secara Nasional, tekanan Volatile Food meningkat pada September, sehingga pemantauan daerah tetap diperlukan.

2. **Ketersediaan pasokan bahan pangan pokok aman**

Pasokan komoditas pangan pokok di Takalar relative terjaga karena didukung oleh produksi pertanian local. Pada September 2026, Pemkab Takalar juga terus mendorong penguatan ketahanan pangan dan produksi local. Hal ini menjadi modal penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain.

3. **Respons cepat terhadap gejolak harga hortikultura**

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan, khususnya cabai dan komoditas hortikultura lainnya. Langkah ini penting karena Agustus-September 2026 tekanan harga pangan secara nasional meningkat, terutama pada cabai rawit, cabai merah, beras, daging ayam dan telur akibat gangguan produksi serta kondisi cuaca.

4. **Koordinasi lintas sektor berjalan efektif**

Koordinasi lintas sektor berjalan efektif. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan HLM TPID yang dipimpin Wakil Bupati menjelang HBKN Maudu Lompoa yang dihadiri Forkopimda, BPS, Bulog dan OPD terkait sehingga pembagian peran menjadi jelas. Saat terjadi kelangkaan BBM, TPID berkoordinasi cepat dengan Pertamina, Polres, Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan untuk mengamankan distribusi pangan dan bantuan beras. Kolaborasi antara Bulog, Dinas Sosial, Camat dan Pemerintah Desa juga berjalan efektif dalam penyaluran bantuan pangan serta pelaksanaan panen raya cabai untuk menjaga pasokan.

5. **Distribusi bahan pangan relatif lancar**

Pasokan beras terjaga dari petani lokal dan stok Bulog, serta didukung kerja sama antar daerah untuk komoditas cabai dan bawang merah. Meskipun sempat ada hambatan akibat keterbatasan BBM, distribusi bantuan pangan dan hasil panen petani ke Pasar Sentral Takalar tetap berjalan melalui koordinasi dengan Pertamina, Dinas Perhubungan dan aparat keamanan.

1. **Kelemahan / Tantangan & Catatan**
2. **Fluktuasi Harga Komoditas Hortikultura Masih Tinggi**

Produksi cabai dan bawang merah lokal menurun akibat kemarau dan belum optimalnya irigasi, sehingga pasokan masih bergantung dari luar daerah seperti Enrekang dan Bantaeng.

2. **Biaya Distribusi Rentan Terhadap BBM**

Kenaikan biaya angkut saat kelangkaan BBM langsung berdampak pada harga di tingkat pengecer karena distribusi pangan masih sangat bergantung pada transportasi darat.

3. **Pelaksanaan Operasi Pasar Belum Merata**

Intervensi Triwulan III lebih fokus pada bantuan pangan beras, sedangkan operasi pasar dan GPM untuk komoditas telur, daging ayam, dan minyak goreng menjelang Maudu Lompoa belum menjangkau semua kecamatan termasuk wilayah kepulauan.

4. **Produksi Lokal Hortikultura Belum Optimal**

Produksi cabai dan bawang merah menurun karena puncak kemarau, rusaknya irigasi tersier dan terbatasnya bantuan pompa air yang belum merata. Akibatnya petani menunda tanam dan pasokan lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan Pasar Sentral Takalar, sehingga masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

5. **Pemanfaatan Digitalisasi Masih Terbatas**

Pemantauan harga dan stok masih dilakukan secara manual di Pasar Sentral Takalar dan pasar-pasar yang ada dikecamatan lainnya belum memanfaatkan aplikasi pelaporan harga secara real time. Informasi pasokan dari petani ke TPID juga belum terintegrasi, sehingga peringatan dini kenaikan harga cabai dan bawang merah sering terlambat.

6. **Disparitas Informasi Harga Di Masyarakat**

Harga di tingkat pasar induk, pasar tradisional dan pengecer sering berbeda jauh karena informasi harga resmi belum tersebar luas ke masyarakat. Keterbatasan akses informasi membuat masyarakat menganggap terjadi kelangkaan, sehingga memicu pembelian berlebihan menjelang hari besar keagamaan, padahal stok secara keseluruhan masih tersedia.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH**

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Kabupaten Takalar Pada Triwulan III Tahun 2026 Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Takalar maka Pemerintah Kab. Takalar merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Terjadwal**

Kebijakan ini terbukti efektif dalam menekan kenaikan harga, khususnya Cabai Merah, Telur ayam Ras, daging ayam ras dan bawang. Ke depan, pelaksanaannya perlu dijadwalkan secara rutin dan diperluas hingga seluruh kecamatan, terutama pada saat terjadi lonjakan harga komoditas.

1. **Pemantauan Harga Harian Berbasis Pasar**

Pemantauan harga secara langsung di pasar menjadi langkah efektif dalam mendeteksi dini kenaikan harga. Kebijakan ini perlu diperkuat dengan sistem pelaporan cepat dari petugas

pasar dan kecamatan sebagai dasar intervensi yang tepat waktu.

1. **Penguatan Cadangan Pangan**

Pemerintah mendorong peningkatan produksi pertanian untuk komoditas volatile. Pada bulan September 2026 dilakukan panen cabai serta penyaluran bantuan irigasi dan pompa air bagi petani.

1. **Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)**

Kerja sama dengan daerah pemasok terbukti membantu menjaga pasokan komoditas seperti cabai dan bawang merah. Kebijakan ini perlu diformalkan dan diperluas agar pasokan lebih terjamin, terutama saat produksi lokal menurun.

1. **Intervensi Komoditas Hortikultura**

Langkah intervensi pada saat terjadi lonjakan harga cabai merah, Telur ayam dan daging ayam terbukti mampu meredam gejolak harga. Ke depan, kebijakan ini perlu diperkuat dengan pengendalian pasokan dan distribusi secara lebih terstruktur.

1. **Dukungan Produksi Lokal melalui Kelompok Tani**

Upaya mendorong produksi lokal, khususnya di beberapa wilayah sentra, cukup efektif dalam menjaga pasokan. Kebijakan ini perlu dilanjutkan melalui bantuan sarana produksi, pendampingan, dan pengaturan pola tanam.

1. **Fasilitasi Kelancaran Distribusi**

Koordinasi lintas sektor dalam menjaga distribusi terbukti mampu menghindari kelangkaan barang di pasar. Kebijakan ini perlu dipertahankan dengan fokus pada efisiensi biaya distribusi dan antisipasi gangguan cuaca.

1. **Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID Secara Rutin**

HLM terbukti efektif sebagai forum pengambilan keputusan cepat dalam merespon dinamika inflasi. Kebijakan ini perlu terus dilaksanakan secara berkala dan lebih berbasis data lapangan.

1. **Penyampaian Informasi Harga kepada Masyarakat**

Publikasi harga dan ketersediaan pangan membantu menjaga ekspektasi masyarakat. Kebijakan ini perlu diperluas hingga ke tingkat desa agar informasi lebih merata.

1. **Pelibatan Pemerintah Kecamatan dan Desa**

Keterlibatan pemerintah wilayah dalam pemantauan harga dan pelaksanaan program terbukti mendukung efektivitas kebijakan. Ke depan, peran ini perlu diperkuat agar pengendalian inflasi lebih merata.